

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Ekonomi merupakan suatu hal yang sangat berkaitan erat dengan kelangsungan hidup manusia. Manusia akan selalu berupaya untuk memenuhi kebutuhannya dalam rangka pencapaian kesejahteraan. Pemenuhan kebutuhan ini dapat dilakukan dengan melakukan kegiatan-kegiatan ekonomi dimana manusia (masyarakat) berperan sebagai rumah tangga produksi (perusahaan) maupun sebagai rumah tangga konsumsi. Menyoroti peranan masyarakat sebagai rumah tangga produksi (perusahaan), hal ini menarik karena kegiatan perusahaan akan dapat mendorong pertumbuhan perekonomian negara dan memberikan kontribusi pada aspek kehidupan lainnya. Perusahaan sebagai wadah kegiatan ekonomik sangatlah berperan penting dalam rangka pembangunan suatu negara sehingga kesejahteraan suatu negara dapat tercapai.

Salah satu bentuk perusahaan yang mempunyai peran penting dalam pembangunan perekonomian suatu negara adalah lembaga keuangan. Lembaga keuangan berperan sebagai dinamisator perekonomian yang berarti bahwa lembaga keuangan merupakan pusat perekonomian, sumber dana, pelaksanaan lalu lintas pembayaran, serta pendorong kemajuan perdagangan nasional dan internasional. Lembaga keuangan sebagai lembaga intermediasi (perantara) menjadi tempat untuk menghimpun dan menyalurkan dana dari dan ke masyarakat

sendiri. Hal ini tertuang dalam Surat Keputusan Menteri Keuangan RI No. 792 Tahun 1990 tentang lembaga keuangan, yaitu lembaga keuangan adalah semua badan yang kegiatannya di bidang keuangan, melakukan penghimpunan dan penyaluran dana kepada masyarakat terutama guna membiayai investasi perusahaan. Pengertian tentang lembaga keuangan ini juga tertuang dalam UU No. 14/ 1967 Pasal 1 yang menyatakan bahwa lembaga keuangan ialah semua badan yang melalui kegiatan-kegiatannya di bidang keuangan, menaruh uang dari dan menyalurkan ke dalam masyarakat. Intinya, dari beberapa pengertian ini dapat kita simpulkan bahwa kegiatan yang dilakukan oleh lembaga keuangan selalu berkaitan dengan bidang keuangan.

Perkembangan lembaga keuangan di Indonesia hingga saat ini masih mengalami pasang surut sejak terjadinya krisis ekonomi. Perhatikan saja pada akhir tahun 1997, beberapa lembaga keuangan terutama perbankan dinyatakan beroperasi secara tidak sehat dan terjadi likuidasi secara besar-besaran. Hal tersebut ditandai dengan penarikan dana oleh publik dan investor. Kasus lain juga terjadi pada lembaga keuangan sekuritas, dimana pada tahun 2007 BEI mencatat terdapat tujuh sekuritas yang mengalami penurunan laba bahkan lebih dari itu PT JJ NAB Capital,Tbk. mengalami kerugian bersih hingga mencapai Rp10,08 miliar (Jurnal Ekonomi, Bisnis, dan Investasi II, 2008:248). Selain itu, beberapa kasus penggelapan dana nasabah juga sempat terjadi di sektor lembaga keuangan sehingga harus menyebabkan dicabutnya ijin operasional lembaga keuangan tersebut, seperti PT Asuransi Sarijaya (bisnis.com, tanggal 16 Agustus 2011).

Krisis di sektor lembaga keuangan yang terjadi hingga saat ini, apabila kita telusuri lebih dalam lagi ternyata tidak hanya diakibatkan semata-mata oleh krisis ekonomi saja. Faktor lain yang juga turut menjadi penyebab ialah penggunaan modal yang tidak efisien serta belum dijalankannya secara optimal praktik *Good Corporate Governance* (GCG). Hal ini serupa dengan penelitian I Nyoman Tjager, dkk. (2003) yang menyatakan bahwa penyebab belum optimalnya kinerja keuangan BUMN adalah karena penggunaan modal yang tidak efisien serta kurangnya perhatian terhadap penerapan prinsip-prinsip GCG. Penelitian lain yang juga sependapat yaitu Anisa Listya (2010) yang menyatakan bahwa dalam rangka menciptakan sistem perbankan yang sehat maka perlu dilakukan implementasi GCG dan audit kinerja secara simultan.

Penerapan GCG diyakini akan dapat memberikan kontribusi strategis dalam meningkatkan kinerja lembaga keuangan, menciptakan iklim bisnis yang sehat, meningkatkan kemampuan daya saing, dan efektif untuk mencegah terjadinya praktik yang menyimpang. Untuk mendukung kelancaran pengimplementasian GCG, sebenarnya pemerintah juga telah mengeluarkan keputusan melalui SK Menteri Perekonomian Nomor: KEP/49/M.EKON/11/2004 tentang penerapan GCG. Sementara itu, dari sektor swasta juga didukung melalui mekanisme pasar modal, seperti PT BEI dan BAPEPAM-LK yang mengeluarkan berbagai regulasi. Regulasi tersebut antara lain Keputusan Ketua BAPEPAM-LK Nomor: KEP-134/BL/2006 tentang kewajiban menyampaikan laporan tahunan bagi emiten dan perusahaan publik. Selain pemerintah melalui menteri perekonomian dan kebijakan Ketua BAPEPAM-LK mengenai pelaksanaan GCG,

Bank Indonesia pun turut mengeluarkan kebijakan yang berfungsi untuk lebih mempertegas kembali akan pelaksanaan GCG di sektor lembaga keuangan. Hal ini tertuang dalam Peraturan Bank Indonesia Nomor:8/4/PBI/2006 tentang pelaksanaan GCG bagi perbankan di Indonesia dan nomor: 11/33/PBI/2009 tentang pelaksanaan GCG bagi bank Syariah.

Pada dasarnya, pelaksanaan GCG haruslah didukung dengan organ yang menjalankan fungsinya sesuai dengan ketentuan dalam melaksanakan tugas, fungsi, dan tanggung jawabnya semata-mata untuk kepentingan lembaga keuangan tersebut. Organ lembaga keuangan itu terdiri dari Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS), Dewan Direksi, dan Dewan Komisaris pada umumnya, serta Auditor Internal dan organ lain perusahaan pada khususnya yang membantu terwujudnya penyelenggaraan GCG. Dengan adanya dukungan ini, maka diharapkan penerapan GCG dapat dijalankan oleh lembaga keuangan dengan optimal untuk memberikan manfaat bagi kepentingan semua pihak. Hal ini serupa dengan yang dinyatakan oleh Monks (2003) dalam Kaihatu (2006) bahwa mekanisme GCG akan bermanfaat dalam mengatur dan mengendalikan perusahaan sehingga menciptakan nilai tambah untuk semua *stakeholders*.

Seperti yang telah dikemukakan di atas bahwa salah satu organ pendukung yang penting dalam pelaksanaan GCG adalah auditor internal. Bank Indonesia juga melalui peraturannya Nomor:11/33/PBI/2009 menyatakan bahwa dalam rangka mewujudkan GCG, maka direksi wajib melakukan audit internal. Hal ini dikarenakan bahwa penerapan auditor internal dapat melakukan pengawasan sehingga dapat menjamin bahwa manajemen telah bertindak sesuai

dengan prinsip-prinsip penerapan GCG. Dengan adanya auditor internal, maka diharapkan dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan, menciptakan iklim disiplin dan pengendalian yang dapat mengurangi kesempatan terjadinya penyimpangan dalam pengelolaan lembaga keuangan, dan mengidentifikasi hal-hal yang memerlukan perhatian manajemen.

Penerapan audit dalam mendukung pelaksanaan GCG sangatlah baik. Akan tetapi audit yang dimaksud tidak dapat hanya dilihat pada perspektif yang sempit saja, yaitu audit keuangan, melainkan audit yang mengarah pada terciptanya perbaikan kinerja lembaga keuangan secara ekonomis, efisiensi, dan efektifitas. Penelitian Suryo Pratolo (2007), menunjukkan bahwa dalam ketidakefektifan kinerja BUMN perlu ditinjau dari aspek ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas operasi BUMN. Semakin ekonomis, efisiensi, dan efektifitas suatu lembaga keuangan dikelola maka akan semakin baik pula kinerja lembaga keuangan tersebut. Untuk melihat sejauh mana lembaga keuangan dikelola secara ekonomis, efektif, dan efisien diperlukan audit ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas operasi manajerial lembaga keuangan yang dikenal sebagai audit manajemen. Apabila dilakukan secara baik dan benar, audit manajemen secara potensial dapat menjadi alat evaluasi yang sangat berguna (Arter, 1997 dalam Suryo Pratolo, 2007).

Mardiasmo (2009) mengungkapkan bahwa audit manajemen belum dapat digunakan untuk mengevaluasi aspek ekonomisasi, efisiensi, dan efektifitas. Hal ini dikarenakan audit manajemen hanya mencakup aspek pengelolaan sumber daya perusahaan secara ekonomis dan efisiensi saja, sementara untuk memenuhi

aspek efektifitas dalam rangka penilaian pencapaian atas program atau tujuan dari lembaga keuangan diperlukan audit program. Menurut Mardiasmo, konsep audit yang tepat digunakan untuk mengevaluasi dan memeriksa kinerja lembaga keuangan secara keseluruhan adalah audit kinerja. Audit kinerja merupakan gabungan dari audit manajemen dan audit program yang bertujuan untuk memastikan bahwa lembaga keuangan telah berjalan secara ekonomis, efisiensi, dan efektifitas.

Untuk mengetahui pengaruh implementasi GCG terhadap kinerja organisasi, maka berbagai penelitian juga telah dilakukan. I Nyoman Tjager, dkk. (2003) dan Deni, dkk. (2004) mencoba meneliti pengaruh penerapan GCG terhadap kinerja BUMN dan perusahaan yang terdaftar di Bursa Efek. Hasilnya, mereka menyatakan bahwa *corporate governance* mempengaruhi kinerja operasi perusahaan. Deni, dkk. (2004) juga mengungkapkan pengaruh signifikan terdapat pada *return of equity* perusahaan. Penelitian ini akhirnya juga didukung oleh penelitian yang dilakukan oleh Suryo Pratolo (2007) yang turut melakukan penelitian terhadap hal ini, akan tetapi Suryo Pratolo, dkk. (2007) menambahkan sistem pengendalian internal sebagai variabel independennya dan mengambil objek penelitiannya di sektor publik, yaitu rumah sakit. Hasilnya, Suryo Pratolo, dkk. (2007) juga memperoleh hasil yang sama bahwa GCG berpengaruh positif terhadap kinerja rumah sakit, bahkan pengaruh dapat secara signifikan apabila penerapan GCG juga disertai dengan sistem pengendalian internal. Selanjutnya, Suryo Pratolo (2007) juga tertarik untuk melakukan penelitian kembali yang serupa. Dalam kesempatan ini, Suryo Pratolo (2007) mencoba mengubah variabel

sistem pengendalian internal menjadi audit manajemen sebagai variabel pendukung. Hal ini dikarenakan menurut Suryo Pratolo (2007) audit manajemen lebih tepat digunakan dalam rangka mengukur sejauh mana perusahaan dikelola secara ekonomis, efisiensi, dan efektifitas dibandingkan dengan dilakukannya pengendalian intern. Hasilnya audit manajemen dan penerapan GCG berpengaruh secara langsung terhadap kinerja BUMN. Penelitian yang serupa dengan Suryo Pratolo (2007) adalah Imelda Pratiwi (2009). Perbedaaan hanya terdapat pada objek penelitian, yang mana Imelda Pratiwi (2009) menjadikan rumah sakit sebagai objeknya. Akan tetapi, walaupun objek penelitian berbeda, namun hasil yang diperoleh tetaplah sama, yaitu terdapat pengaruh positif dari penerapan audit manajemen dan GCG terhadap kinerja.

Penelitian ini mereplikasi kembali penelitian Suryo Pratolo (2007). Namun dalam model penelitiannya, variabel audit menggunakan audit kinerja. Hal ini juga telah dilakukan oleh Anisa Listya (2010) yang meneliti pengaruh GCG terhadap kinerja dengan menggunakan audit kinerja. Berdasarkan fenomena dan penelitian terdahulu inilah, maka peneliti ingin melakukan penelitian mengenai pengaruh implementasi GCG terhadap kinerja lembaga keuangan dengan meninjau aspek audit kinerja sebagai variabel pendukungnya. Peneliti menggunakan audit kinerja sebagai faktor pendukung mengingat pernyataan Mardiasmo (2009) yang menyatakan bahwa konsep audit yang lebih tepat untuk memeriksa kinerja perusahaan secara keseluruhan adalah audit kinerja.

B. Rumusan Masalah

Fenomena kinerja lembaga keuangan yang belum optimal, belum melembaganya GCG, dan belum baiknya sistem audit dalam menunjang GCG, dapat dirumuskan menjadi rumusan masalah penelitian sebagai berikut:

1. Apakah pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap kinerja lembaga keuangan?
2. Apakah pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* dengan audit kinerja sebagai variabel moderating terhadap kinerja lembaga keuangan secara simultan?

C. Tujuan Penelitian

Sesuai dengan rumusan masalah di atas, tujuan penelitian ini adalah:

1. Mengetahui pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* terhadap kinerja lembaga keuangan.
2. Mengetahui pengaruh implementasi *Good Corporate Governance* dengan audit kinerja sebagai variabel moderating terhadap kinerja lembaga keuangan secara simultan.

D. Manfaat Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat bagi banyak pihak, antara lain:

1. Bagi Dunia Pendidikan

Memberikan kontribusi pada pengembangan ilmu akuntansi, khususnya pemeriksaan akuntansi (*auditing*) mengenai pengaruh penerapan GCG dalam

suatu lembaga keuangan terhadap kinerjanya yang didukung dengan pelaksanaan audit kinerja. Selain itu, hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan referensi dan data tambahan untuk memperkuat teori-teori maupun penelitian yang telah ada.

2. Bagi Lembaga Keuangan

Memberikan masukan bagi lembaga keuangan dalam hal penyusunan kebijakan sehubungan dengan penerapan audit kinerja dan implementasi GCG demi perbaikan kinerja lembaga keuangan.

3. Bagi Pemerintah

Sebagai suatu pertimbangan bagi pihak pemerintah atau lembaga-lembaga yang berwenang dalam membuat suatu regulasi dalam rangka meningkatkan kualitas penerapan praktik GCG pada lembaga keuangan.

E. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian asosiatif-kausal yang bertujuan untuk mengetahui pengaruh dua variabel atau lebih.

2. Populasi dan Teknik Pemilihan Sampel

Populasi dalam penelitian ini adalah lembaga keuangan. Teknik pengambilan sampel menggunakan *convenience sampling* yaitu teknik pengambilan sampel berdasarkan kebetulan saja.

3. Data dan Teknik Pengumpulan Data

Jenis data dalam penelitian ini adalah data primer. Data primer adalah data yang dikumpulkan sendiri oleh peneliti langsung dari sumber pertama. Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini adalah teknik survey dengan kuesioner.

4. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan adalah analisis regresi. Analisis regresi adalah suatu teknik analisis data yang digunakan untuk mengetahui seberapa besar pengaruh antara variabel independen terhadap variabel dependen. Dalam penelitian ini, bentuk analisis regresi yang digunakan adalah *Moderat Regression Analyzis* (MRA). Sementara itu, pengujian hipotesis sendiri dilakukan dengan menggunakan uji-t dan uji-F (ANOVA) dengan tingkat probabilitasnya 5% (0,05).

F. Sistematika Penulisan

BAB I PENDAHULUAN

Bab ini menjelaskan mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, metode penelitian, dan sistematika penulisan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab ini memaparkan teori mengenai pengertian *Good Corporate Governance*, prinsip-prinsip *Good Corporate Governance*, perkembangan *Good Corporate Governance* di Indonesia, penerapan

Good Corporate Governance dalam perusahaan, dampak *Good Corporate Governance* terhadap kinerja lembaga keuangan, peran audit kinerja dalam penerapan *Good Corporate Governance*, dan penelitian terdahulu.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab ini menjelaskan tentang jenis penelitian, populasi dan teknik pemilihan sampel, data dan teknik pengumpulan data, instrumen penelitian, variabel penelitian, dan teknik analisis data.

BAB IV ANALISIS DAN PEMBAHASAN

Bab ini berisi pengolahan data dan pembahasan atas masalah yang telah dirumuskan serta hasil yang diperoleh selama melakukan penelitian.

BAB V SIMPULAN DAN SARAN

Bab ini membahas simpulan dan saran penelitian dari analisis data yang dilakukan.